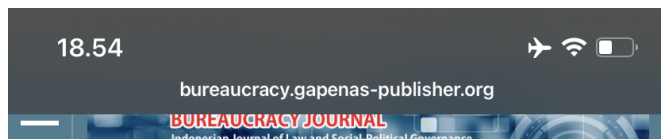


LINK JURNAL :

<https://bureaucracy.gapenaspublisher.org/index.php/home/article/view/155>



HOME / ARCHIVES /
VOL. 3 NO. 1 (2023): BUREAUCRACY JOURNAL :
INDONESIA JOURNAL OF LAW AND SOCIAL-POLITICAL
GOVERNANCE (IN PRESS)

Articles

AKIBAT HUKUM DALAM PEMALSUAN SURAT TERHADAP TINDAK PIDANA PERTANAHAN PADA PENDAFTARAN TANAH

Nazilah Maghfiroh

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Sri Setyadi

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

DOI: <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.155>

Keywords: Tindak Pidana, Pemalsuan Surat, Pendaftaran Tanah, Forgery of Letters, Crime, Land Registration

ABSTRACT

Land registration is a series of activities carried out by the government regularly and continuously. Includes

Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023

AKIBAT HUKUM DALAM PEMALSUAN SURAT TERHADAP TINDAK PIDANA PERTANAHAN PADA PENDAFTARAN TANAH

Nazilah Maghfiroh¹, Sri Setyadi²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

E-mail: nazilah.maghfiroh@gmail.com, ebes.sriadi@gmail.com

ABSTRACT

Land registration is a series of activities carried out by the government regularly and continuously. Includes processing, data collection, accounting and maintenance of factual and legal data in the form of maps and inventories of land and residences, as well as issuing certificates of land rights with ownership rights and existing residential units in accordance with Government Regulation No. 24 of 1997. The study discusses the legal consequences of falsifying land registration documents using a normative, juridical, and a statutory, and conceptual approach. The study results show that there is an imbalance between the amount and area of available land, which does not increase, so that the need for community use increases, causing land to become very important, leading to state interference through officials in the land law order. The forgery of the letter is part of an effective concentration on sensitive legal issues or the absence of existing regulations in Indonesia. The crime of forging letters is endless, all of them are listed in Article 263 of the Criminal Code. Facts prove that there are still many rights of every person that some letter makers ignore, causing losses.

Keywords: Land Registration, Crime, Forgery of Letters

ABSTRAK

Pendaftaran tanah merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara teratur dan berkesinambungan. Meliputi pengolahan, pendataan, pembukuan dan pemeliharaan data faktual dan hukum berupa peta dan inventarisasi tanah dan tempat tinggal, serta penerbitan sertipikat hak atas tanah dengan hak milik dan satuan rumah tinggal yang ada sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Kajian ini membahas akibat hukum pemalsuan surat pendaftaran tanah dengan pendekatan normatif, perundang-undangan, dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan adanya ketimpangan antara jumlah dan luas tanah yang tersedia yang tidak bertambah, sehingga kebutuhan akan pemanfaatan oleh masyarakat meningkat sehingga menyebabkan tanah menjadi sangat penting sehingga menimbulkan campur tangan negara melalui aparaturnya dalam tatanan hukum pertanahan. Pemalsuan surat tersebut merupakan bagian dari konsentrasi efektif terhadap isu hukum yang sensitif atau belum adanya regulasi yang ada di Indonesia. Tindak pidana pemalsuan surat tidak ada habisnya, semuanya tercantum dalam Pasal 263 KUHP. Fakta membuktikan bahwa masih banyak hak setiap orang yang diabaikan oleh sebagian pembuat surat sehingga menimbulkan kerugian.

Kata kunci: Pendaftaran Tanah, Pemalsuan Surat, Tindak Pidana

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan negara Indonesia membawa dampak positif yaitu meningkatnya kesejahteraan rakyat, dan dampak negatif yaitu munculnya berbagai kejahatan. Sekali lagi, sama halnya dengan sektor pertanahan. Dinamika pembangunan menyebabkan kebutuhan lahan meningkat, di sisi lain persediaan lahan sangat terbatas. Oleh karena itu, peningkatan satu permintaan akan mengurangi pasokan lahan untuk kebutuhan

DOI: 10.53363/bureau.v3i1.155

64

Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023

lainnya. Selain itu, dapat menyebabkan alih fungsi lahan pertanian dan non-pertanian sehingga menyebabkan harga tanah menjadi lebih tinggi.

Pertumbuhan pembangunan dapat dibagi menjadi dua bagian, ekonomi dan teknologi, yang memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan secara keseluruhan, termasuk bidang hukum. Dinamika sosial tidak lepas dari kebutuhan masyarakat yang semakin

LoA Jurnal :

1 dari 1



JURNAL PENELITIAN BUREAUCRACY

Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance

Gg. H.Ridan No.48 RT. 002/002 Kelurahan Poris Plawad Indah Kecamatan Cipondoh Tangerang Banten

LETTER OF ACCEPTANCE (LOA)

Kepada Yth

Bpk/Ibu

Nazilah Maghfiroh, Sri Setyadji

Berdasarkan hasil revisi yang sudah bpk/ibu kirim, dan setelah melalui proses Review yang bertahap yang telah dilakukan oleh Reviewer kami, maka dengan ini :

Nama Penulis : Nazilah Maghfiroh, Sri Setyadji
Judul Penelitian : AKIBAT HUKUM DALAM PEMALSUAN SURAT TERHADAP TINDAK PIDANA PERTANAHAN PADA PENDAFTARAN TANAH

Dengan ini kami nyatakan artikel bpk/ibu "**DITERIMA**" dan akan kami terbitkan pada **Jurnal Bureaucracy Volume 3 No 1** bulan **Januari-April 2023**. Demikianlah *Letter of Acceptance (LoA)* ini dibuat semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, Desember 2022


GAPENAS
Garuda Prestasi Nusantara
Dr. Yudi Nur Supriadi